

DETERMINAN KEUANGAN INKLUSIF DI SUMATERA UTARA, INDONESIA

Lia Nazliana Nasution¹, Pipit Buana Sari², Handriyani Dwilita³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Panca Budi Sumatera Utara
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Sei Sikambing 20122
Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Phone: +61 8455571
E-mail korespondensi: nazlie311@gmail.com

Naskah diterima: Januari 2013; disetujui: Maret 2013

Abstract: This study is a baseline study that presents an overview of some of the factors that affect the application of policies of inclusive finance in North Sumatra. In this study the authors conducted a descriptive study of the total population, the number of productive population, the number of bank branches in North Sumatra and North Sumatra GRDP in the period 2010 to 2013. It is known that the number of people in North Sumatra in the period of observation has increased, but experienced reduction in the workforce. If seen from the data that reflected the local revenue of the value of GDP then an increase in revenue in North Sumatra, but not too big. While other factors measured were the number of bank branches operating in North Sumatra in the period of the study data showed that there was a significant increase over the number of bank branches operating in North Sumatra. This means that in terms of factors of population, income and branch offices in North Sumatra have been quite supportive of the application and implementation of better towards inclusive finance in North Sumatra.

Keywords: inclusive finance; labor force; gross domestic regional product; banking service
JEL Classification: G32

Abstrak: Studi ini merupakan kajian dasar yang menyajikan beberapa gambaran sebagian faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan inklusif keuangan di Sumatera Utara. Pada studi ini penulis melakukan kajian deskriptif terhadap jumlah penduduk, jumlah penduduk produktif, jumlah kantor cabang bank di Sumatera Utara dan PDRB Sumatera Utara dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2013. Diketahui bahwa jumlah penduduk di Sumatera Utara dalam kurun waktu pengamatan mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan jumlah angkatan kerja. Jika dilihat dari data pendapatan daerah yang dicerminkan dari nilai PDRB maka terjadi peningkatan pendapatan di Sumatera Utara, namun tidak terlalu besar. Sedangkan faktor lainnya yang diamati adalah jumlah kantor cabang bank yang beroperasi di Sumatera Utara dalam kurun waktu studi diperoleh data bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan atas jumlah kantor cabang perbankan yang beroperasi di Sumatera Utara. Ini artinya dari segi faktor jumlah penduduk, pendapatan dan kantor cabang di Sumatera Utara telah cukup mendukung atas penerapan dan pelaksanaan yang lebih baik terhadap keuangan inklusif di Sumatera Utara.

Kata kunci: keuangan inklusif; angkatan kerja; produk domestik regional bruto; layanan perbankan

Klasifikasi JEL: G32

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian suatu negara akan dipengaruhi beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun faktor

yang berasal dari luar negeri. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian tersebut adalah perkembangan keuangan. Ketika keuangan suatu negara berkembang maka akan berdampak positif terhadap

peningkatan perekonomian. Dalam hal pengembangan jasa keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan OJK mempunyai peran penting terhadap pelaksanaan dan pengawasan regulasi sektor keuangan di Indonesia. Bahkan ketiga institusi tersebut telah memiliki suatu suara terkait dengan sinergi peran jasa keuangan dan pengentasan kemiskinan. Perluasan penggunaan jasa keuangan diyakini berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Dengan meningkatnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat terhadap jasa keuangan maka tingkat kemiskinan akan menurun dan peningkatan keuangan akan terjadi, pada akhirnya akan bermuara pada perkembangan perekonomian suatu daerah/negara.

Kemiskinan salah satunya disebabkan oleh terjadinya kesenjangan pendapatan di masyarakat. Negara anggota G20, OECD, the World Bank, IMF, ADB, dan Asean telah sepakat bahwa perlu diberi perhatian penuh terhadap kesenjangan pendapatan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2012, Indonesia telah sepakat bersama institusi tersebut untuk meluncurkan strategi nasional keuangan inklusif yang akan menjadi acuan dalam strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Keuangan inklusif pada dasarnya merupakan upaya yang disusun secara bersama yang bertujuan meniadakan bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya terjangkau. Bank Indonesia telah menyampaikan enam pilar yang menjadi dasar pelaksanaan keuangan inklusif di Indonesia. Keenam pilar tersebut meliputi: Edukasi Keuangan, Fasilitas Keuangan Publik, Pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, dan perlindungan konsumen.

Beberapa studi pernah dilakukan terkait dengan penerapan keuangan inklusif di dunia khususnya di Asia. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Ummah (2013) dikatakan bahwa diantara negara-negara di Asia maka Jepang dan Korea Selatan merupakan negara dengan nilai indeks inklusif tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Jepang memiliki nilai indeks inklusif sebesar 0,9 dan Korea Selatan memiliki nilai indeks inklusif sebesar 0,5. Ini artinya bahwa hanya ke dua negara tersebut yang relatif merata dalam hal

akses dan pelayanan keuangan yang lebih baik. Studi yang dilakukan Ummah dalam kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2011. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan kebijakan keuangan inklusif maupun kemundurannya, salah satunya seperti yang pernah disampaikan Setiawan, bahwa perilaku personal dapat menjadi faktor seseorang dalam menggunakan jasa perbankan.

Provinsi Sumatera Utara termasuk pada provinsi yang mengalami tingkat perkembangan perekonomian yang cukup baik jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Indonesia. Tercatat bahwa ibukota provinsi Sumatera Utara merupakan termasuk kota besar yang berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Namun berdasarkan data yang disampaikan oleh Bank Indonesia, Sumatera Utara masih dalam kategori *underbanked*. Sumatera Utara walaupun termasuk provinsi yang memiliki potensi sumber daya ekonomi yang cukup baik namun dalam hal penggunaan jasa keuangan perbankan masih dalam kategori rendah. Ini dapat menjadi indikasi bahwa pemerataan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara belum merata, dan pengetahuan mengenai jasa perbankan juga belum terserap di seluruh pelosok negeri.

Studi ini menggambarkan beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan keuangan inklusif di Sumatera Utara. Faktor yang diuraikan dalam studi ini adalah: jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja, jumlah kantor cabang bank, dan pendapatan daerah (PDRB) selama kurun waktu 2010 hingga 2013.

Konsep Inklusif Keuangan. Konsep inklusi keuangan muncul setelah adanya konsep eksklusif keuangan. Berbagai peneliti mendefinisikan inklusi keuangan sebagai kebalikan dari eksklusif keuangan. Sarma (2012) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi.

Bank Indonesia (2013) mendefinisikan keuangan inklusi (*financial inclusion*) sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Indikator yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan yang inklusif sebuah negara adalah ketersediaan/akses untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kesejahteraan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

Beck *et al.* (2007) menyatakan bahwa konsep akses jasa keuangan dengan penggunaan jasa keuangan adalah konsep yang berbeda. Pelaku ekonomi mungkin memiliki akses terhadap jasa keuangan tetapi tidak ingin menggunakannya. Hal ini dapat disebabkan alasan sosial budaya ataupun biaya imbalan yang terlalu tinggi untuk menggunakan jasa keuangan. Oleh karena itu, Beck *et al.* membedakan kedua konsep terkait jangkauan sektor keuangan, yaitu (i) adanya akses dan kemungkinan dalam menggunakan jasa keuangan, dan (ii) penggunaan jasa keuangan aktual artinya yang benar-benar menggunakan jasa keuangan. Adanya akses dan kemungkinan dalam menggunakan jasa keuangan di suatu daerah diukur dengan jumlah *outlet*/kantor cabang perbankan dan ATM yang ada di daerah tersebut. Semakin tinggi intensitas *outlet*/kantor cabang bank dan ATM maka semakin tinggi pula kemungkinan dalam mengakses dan kesempatan dalam menggunakan jasa keuangan. Sedangkan konsep kedua diukur dengan jumlah rekening kredit dan deposit serta rata-rata kredit dan deposit per GDP per kapita. Tingginya kepemilikan rekening kredit dan deposit menunjukkan tingginya penggunaan jasa keuangan.

Demirguc-Kunt A *et al.* (2008) menjelaskan lebih terperinci terkait perbedaan akses terhadap jasa keuangan dengan penggunaan jasa keuangan. Akses ditujukan untuk penawaran sedangkan penggunaan jasa keuangan ditentukan baik oleh penawaran maupun permintaan. Walaupun seseorang berpendapatan tinggi memiliki akses terhadap jasa keuangan, ada kemungkinan saja ia tidak tertarik untuk menggunakan jasa tersebut. Begitu pula dengan nasabah, baik individu maupun perusahaan, belum tentu mau meminjam uang meskipun

ditawari dengan suku bunga yang rendah.

Index of Financial Inclusion (IFI). Beberapa peneliti mengukur inklusi keuangan dengan menghitung proporsi dari populasi dewasa atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap jasa keuangan formal. Studi yang lain membedakan konsep akses jasa keuangan dengan penggunaan jasa keuangan. Akses jasa keuangan dapat diukur dengan jumlah kantor perbankan dan jumlah ATM yang tersebar pada suatu wilayah, penggunaan jasa keuangan diukur dengan jumlah deposit serta kredit yang dilemparkan/dialurkan (World Bank 2008). Sarma *et.al.* (2011) merangkum itu semua dalam satu konsep yaitu Indeks Inklusi Keuangan (*Index of Financial Inclusion*). Indeks ini sendiri digunakan untuk mengukur keinklusi sistem keuangan di suatu negara. Perhitungan IFI yang dikembangkan oleh Sarma terbagi atas tiga dimensi yaitu:

1) **Penetrasi Perbankan.** Penetrasi perbankan adalah indikator utama dalam inklusi keuangan. Semakin banyak penggunanya maka semakin baik, karena itu sistem keuangan diharapkan dapat menjangkau secara luas di antara penggunanya. Salah satu indikator penetrasi perbankan adalah proporsi populasi yang memiliki rekening dibank.

2) **Ketersediaan jasa keuangan.** Jasa keuangan harus tersedia bagi semua pengguna, dalam suatu sistem keuangan yang inklusif. Ukuran ketersediaan ini adalah jumlah *outlet* (kantor cabang, ATM, dan lain lain). Ketersediaan jasa dapat dilihat dari jumlah cabang lembaga keuangan atau jumlah ATM (*Automatic Teller Machine*). Tidak bisa dipungkiri ATM memiliki peranan yang sangat penting bagi jasa perbankan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Kemudahan dalam mengambil tunai, penyetoran tunai serta digunakan untuk pembayaran membuat ATM menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat. Dengan adanya kantor cabang dan ATM, masyarakat akan semakin mudah menjangkau jasa keuangan.

3) **Penggunaan jasa perbankan.** Banyak alasan mengapa sekelompok orang masih belum memanfaatkan keberadaan jasa keuangan meskipun mereka memiliki akses terhadap jasa keuangan. Di antaranya, jauhnya *outlet* bank dari tempat kediaman atau aktivitas sehari-hari, pengalaman buruk yang melibatkan penyedia

jasa. Oleh sebab itu, memiliki rekening tidak cukup untuk menunjukkan sistem keuangan yang inklusif, namun masyarakat juga bisa menggunakannya. Kegunaan tersebut di antaranya dapat dalam bentuk kredit, deposit, pembayaran, remitansi, dan transfer.

Berbagai studi tentang literasi keuangan telah dilakukan di beberapa negara. Wachira dan Kihiu (2012) telah melakukan studi tentang pengaruh literasi keuangan terhadap akses jasa keuangan di Kenya pada tahun 2009, ternyata akses terhadap jasa keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan tetapi lebih besar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, jarak dari bank, usia, status perkawinan, jenis kelamin, ukuran rumah tangga, dan tingkat pendidikan.

Adapun studi Beck *et al.* (2007) di 99 negara pada tahun 2003-2004 menunjukkan bahwa faktor yang menentukan jangkauan sektor keuangan sama dengan faktor yang menentukan kedalaman sektor keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat dari pembangunan yang diproksikan dengan GDP per kapita, kualitas institusi yang diproksikan dengan *governance index*, serta informasi kredit yang diproksikan dengan *credit information index*.

Van der Werff *et al.* (2013), dalam studinya di 31 negara OECD tahun 2011, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi proporsi populasi yang mengakses perbankan adalah ketimpangan pendapatan, jumlah ATM dan bank per 100.000 populasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang diproksikan dengan *corruption index* dan GNI per kapita. Inklusi keuangan juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

Andrianaivo dan Kpodar (2012) menganalisis 44 negara di benua Afrika dengan menggunakan data tahun 1988-2007 terkait hubungan telepon seluler, inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil studi tersebut menjelaskan bahwa pengembangan telepon seluler berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika. Selain itu, inklusi keuangan yang diukur dengan jumlah tabungan dan pinjaman per kapita menjadi salah satu jalur transmisi dari perkembangan telepon seluler terhadap pertumbuhan.

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai fungsinya dalam menghimpun

dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. (Kasmir, 2004:417)

Menurut Susilo (2002) Bank dalam sistem keuangan mempunyai peranan penting sebagai berikut: 1) Pengalihan Asset (*Assets Transmutation*), 2) Transaksi (*Transaction*), Likuiditas (*Liquidity*), 3) Efisiensi (*Efficiency*) Selain peran dari perbankan diperlukan juga peran dari pemerintah yang dalam hal ini bertindak mengatur pemerataan pendapatan, stabilitas ekonomi serta mengeluarkan deregulasi di segala bidang, terutama yang berhubungan dengan perbankan dan perekonomian. Peran pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat sangat penting, karena dengan peningkatan pendapatan ini akan mendorong meningkatnya pola konsumsi masyarakat dan juga tabungan masyarakat.

Saat ini yang memiliki kesempatan untuk menabung dengan jumlah yang banyak adalah orang kaya, karena mereka memiliki pendapatan yang lebih yang tidak habis untuk dikonsumsi, sementara orang miskin sendiri tidak memiliki kesempatan untuk menabung, karena sebagian besar pendapatan mereka telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pendapatan perkapita merupakan *personal income* di mana pendapatan yang diterima rumah tangga dan bisnis non perusahaan. Nilainya diperoleh dengan membagi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut (Mankiw, 2003:10). Dengan adanya pendapatan perkapita suatu negara mengharap pembangunan ekonomi mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, karena pendapatan perkapita suatu negara dapat membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta dapat membandingkan laju perkembangan ekonomi yang telah dicapai oleh negara dari masa ke masa

Definisi Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu biasanya dalam satu tahun. (Data: Badan Pusat Statistik).

Menurut Anwar (1992) Produk Domestik Regional Bruto adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah atau regional tanpa memilih atas faktor produksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah pada satu tahun. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pertumbuhan penduduk justru mendorong usaha pertumbuhan ekonomi, sebab kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi niscaya standar hidup manusia pasti semakin merosot.

Jumlah penduduk adalah manusia dan bukan yang lainnya (misalnya: ternak, tumbuhan, dan sebagainya) yang melakukan produksi maupun konsumsi. Tampak jelas bahwa penduduk merupakan faktor yang justru lebih serius di sektor pertanian dibanding sektor di luar pertanian. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pertumbuhan penduduk justru mendorong usaha pertumbuhan ekonomi, sebab kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi niscaya standar hidup manusia pasti semakin merosot. (Suparmoko, 1997:53) Penduduk dipandang sebagai nasabah yang akan melakukan kegiatan menabung. Seperti yang diutarakan oleh Kasmir, bahwa dana terbesar sektor perbankan didominasi oleh dana pihak ketiga yaitu yang diperoleh dari masyarakat. (Kasmir, 2004:19). Makin banyak jumlah penduduk makin tinggi pula jumlah dana tabungan masyarakat yang dihimpun oleh sektor perbankan.

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan studi dengan analisis deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang dipilih yang memiliki gambaran terhadap penerapan keuangan inklusif.

Studi ini dilakukan di Sumatera Utara mulai dari tahun 2010–2013. Variabel yang diamati atau diukur: jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja, jumlah kantor cabang bank dan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB). Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder dengan jenis data runtun waktu (*time series*) tahunan yang bersumber dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Di samping itu untuk data pendukung lainnya diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, dan hasil studi. Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder dengan jenis data runtun waktu (*time series*) tahunan mulai tahun 2010–2013, yang bersumber dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Di samping itu untuk data pendukung lainnya diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, dan hasil studi. Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam studi ini adalah jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja, jumlah kantor cabang bank, dan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang digunakan dalam studi ini meliputi Jumlah penduduk di SUMUT, jumlah angkatan kerja, jumlah kantor cabang, dan PDRB ADHK SUMUT. Tahun pengamatan yang dipilih adalah tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Pada tabel 1 disajikan tabel data variabel penelitian.

Potensi sumber daya untuk peningkatan perekonomian suatu daerah salah satunya adalah penduduk, khususnya penduduk produktif. Peningkatan jumlah penduduk produktif dapat menstimulus peningkatan roda perekonomian. Hal ini dikarenakan penduduklah yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi dan konsumsi. Dalam tabel 2 disajikan olah data deskriptif jumlah penduduk dan

Tabel 1. Variabel penelitian, tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013*

Variabel	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Angkatan Kerja (>15thn) SUMUT (jiwa)	6.617.377	6.314.239	6.131.664	6.311.762
Jumlah Penduduk SUMUT (jiwa)	12.982.204	13.103.596	13.215.401	13.326.307
Jumlah Kantor Cabang Bank di SUMUT	174	178	192	199
PDRB ADHK SUMUT (miliar rupiah)	118.640,90	126.587,62	134.461,50	142.537,12

Tabel 2. Jumlah penduduk SUMUT (jiwa) dan jumlah angkatan kerja (>15thn) SUMUT (jiwa)

Variabel	2010	2011	2012	2013*	Average	Max	Min
Jumlah Penduduk SUMUT (jiwa)	12.982.204	13.103.596	13.215.401	13.326.307	13.156.877	13.326.307	12.982.204
Jumlah Angkatan Kerja (>15thn) SUMUT (jiwa)	6.617.377	6.314.239	6.131.664	6.311.762	6.343.761	6.617.377	6.131.664

jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, jumlah penduduk di Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 344.103 jiwa, atau sebesar 2,58 persen. Ini merupakan potensi yang dimiliki untuk merespon dan menjalankan kebijakan ekonomi dan roda perekonomian di Sumatera Utara. Jumlah penduduk terbesar terjadi pada tahun 2013. Namun tidak keseluruhan jumlah penduduk tersebut yang memiliki peran aktif dalam mendukung roda perekonomian khususnya dalam mensukseskan program inklusif keuangan. Hanya penduduk yang masuk dalam kategori produktif saja yang digolongkan sebagai sumber daya manusia yang mendukung keuangan inklusif, yaitu di atas umur 15 tahun sampai umur 55 tahun.

Berdasarkan data yang disajikan di atas diketahui bahwa jumlah angkatan kerja mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Jumlah angkatan kerja tertinggi terjadi tahun 2010 sebesar 6.617.377 jiwa dan jumlah angkatan kerja terendah justru terjadi pada tahun 2012 sebesar 6.131.664 jiwa. Berikut ini akan disajikan grafik perubahan Jumlah Penduduk dan Jumlah angkatan kerja yang terjadi di Sumatera Utara selama kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2013.

Penurunan jumlah angkatan kerja yang terjadi di Sumatera Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perpindahan penduduk angkatan kerja yang awalnya berdomisili di Sumatera Utara ke kota yang menawarkan pekerjaan lebih baik atau lebih sesuai, pernikahan, dan rendahnya penawaran kerja yang

tersedia di Sumatera Utara terutama di daerah-daerah.



Gambar 1. Jumlah Penduduk SUMUT (jiwa) periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013



Gambar 2. Jumlah Angkatan Kerja (>15thn) SUMUT (jiwa)

Tidak dapat dipungkiri bahwa penawaran lapangan pekerjaan masih terpusat pada kota-kota tertentu, tidak merata di seluruh kota di Sumatera Utara. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap terjadinya kesenjangan pendapatan yang terjadi di Sumatera Utara. Kesenjangan pendapatan dapat menjadi indikator terjadinya kesenjangan penerapan kebijakan keuangan inklusif yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Berikut ini akan disajikan perban-

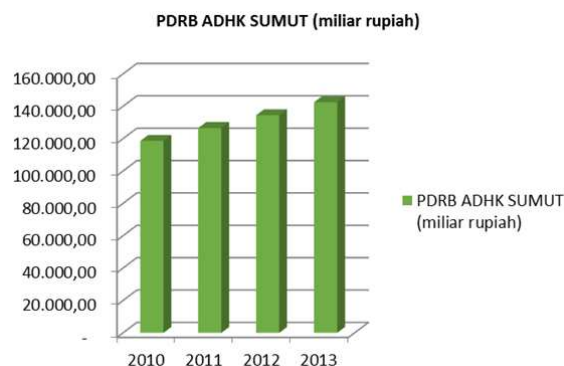
Tabel 3. Jumlah angkatan kerja (>15thn) SUMUT (jiwa) dan PDRB ADHK SUMUT (miliar rupiah) tahun 2010 sampai dengan tahun 2013

Variabel	2010	2011	2012	2013	Average	Max	Min
Jumlah Angkatan Kerja (>15thn) SUMUT (jiwa)	6,617,377	6,314,239	6,131,664	6,311,762	6,343,761	6,617,377	6,131,664
PDRB ADHK SUMUT (miliar rupiah)	18,640.90	126,587.62	134,461.50	142,537.12	130,556.79	142,537.12	118,640.90

dengan Jumlah Angkatan Kerja dengan Pendapatan di Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di atas dapat dilihat bahwa PDRB ADHK di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata PDRB ADHK sebesar 130.556,79 miliar rupiah. Nilai PDRB ADHK terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 118.640,90 miliar rupiah, dan nilai PDRB ADHK tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 142.537,12 miliar rupiah. Peningkatan PDRB ADHK yang terjadi di Sumatera Utara selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 adalah sebesar 16,76 persen.

Berikut ini grafik yang menggambarkan perubahan PDRB ADHK dalam miliar rupiah



Gambar 3. PDRB ADHK SUMUT (miliar rupiah) tahun 2010 sampai dengan 2013

Peningkatan PDRB ADHK yang terjadi di Sumatera Utara menjadi ukuran bahwa terjadi peningkatan perekonomian di Sumatera Utara dan peningkatan peran masyarakat terhadap produksi dan konsumsi. Penurunan angkatan kerja yang tersedia di Sumatera Utara sebesar

4,84 persen ternyata tidak menyebabkan penurunan jumlah pendapatan masyarakat. Ini bisa menjadi indikasi bahwa mungkin terdapat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terjadi di Sumatera Utara, atau terjadi peningkatan lapangan pekerjaan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Memang perlu studi lebih lanjut untuk menyimpulkan fenomena tersebut. Namun dari penjelasan di atas dapat kita katakan bahwa tersedianya jumlah penduduk produktif dan peningkatan pendapatan daerah di Sumatera Utara dapat menjadi stimulus penerapan enam pilar kebijakan keuangan inklusif di Sumatera utara. Berdasarkan informasi data yang pernah disampaikan oleh Bank Indonesia pada Evolusi Kerangka Kebijakan Financial Inclusion pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Utara masih dalam kategori *underbanked*. Ini artinya walaupun dari tahun 2010 sampai dengan 2013, pendapatan daerah di Sumatera Utara mengalami peningkatan namun peran masyarakat terhadap pemakainya jasa keuangan perbankan masih relatif kecil. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa: masih banyak informasi keuangan yang belum terserap secara merata, jika pun penetrasi keuangan telah dilakukan namun belum menyeluruh dan tersebar secara luas, ini juga bisa menjadi indikasi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan masih rendah.

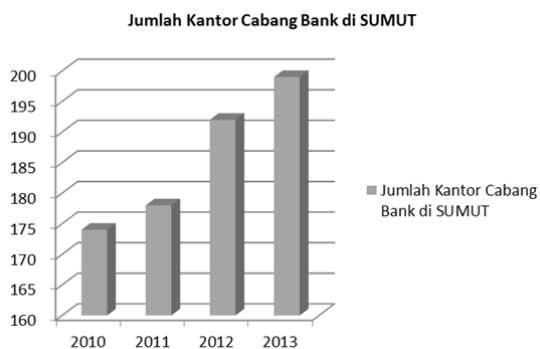
Sebagai acuan lain berikut ini akan disajikan data perkembangan perbankan di Sumatera Utara terutama perkembangan kantor cabang bank-bank nasional yang ada di Sumatera Utara.

Dalam kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2013, jumlah kantor cabang Bank di Sumatera Utara mengalami peningkatan sekitar 12,56%. Tahun 2013 jumlah kantor cabang yang telah dibuka di Sumatera Utara sebesar 199

Tabel 4. Jumlah Kantor Cabang Bank di SUMUT dan PDRB ADHK SUMUT (miliar rupiah) dalam kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2013*

Variabel	2010	2011	2012	2013*	Average	Max	Min
Jumlah Kantor Cabang Bank di SUMUT	174	178	192	199	186	199	174
PDRB ADHK SUMUT (miliar rupiah)	118.640,90	126.587,62	134.461,50	142.537,12	130.556,79	142.537,12	118.640,90

kantor. Peningkatan pembukaan kantor cabang ini konsisten terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2013.



Gambar 4. Jumlah Kantor Cabang Bank di SUMUT periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013

Ini menjadi indikasi bahwa perkembangan perbankan di Sumatera Utara cukup baik. Ini bisa juga dikatakan bahwa faktor yang mendukung penerapan suksesnya kebijakan keuangan inklusif di Sumatera Utara telah tersedia. Hanya perlu pengamatan dan studi lebih lanjut seberapa luas penyebaran penggunaan jasa keuangan perbankan. Perlu diteliti lebih lanjut tentunya tentang efektif tidaknya penetrasi yang telah dilakukan masing-masing bank, BI dan OJK di wilayah-wilayah pelosok di Sumatera Utara.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak mencerminkan jumlah angkatan kerja yang berperan dalam perekonomian suatu daerah. Peningkatan jumlah pendapatan di Sumatera Utara selama kurun waktu 2010 sampai dengan

tahun 2013 mengalami peningkatan. Demikian pula dengan jumlah pembukaan kantor cabang bank yang beroperasi di Sumatera utara. Ini menjadi indikasi bahwa beberapa faktor yang dapat mendukung penerapan enam pilar kebijakan pelaksanaan keuangan inklusif dapat terlaksana. Namun perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk lebih mendalami lagi masing-masing pilar keuangan inklusif Indonesia.

Berdasarkan simpulan di atas, maka perlu dilakukan studi lebih lanjut terhadap kesiapan penerapan enam pilar kebijakan keuangan inklusif di Sumatera Utara. Terutama terkait dengan efektivitas pelaksanaan penetrasi terkait pemahaman jasa keuangan perbankan hingga ke pelosok-pelosok daerah di Sumatera Utara. Karena terdapat indikasi ketidakmerataan penggunaan informasi dan jasa keuangan sampai pada pelosok-pelosok daerah yang terdapat di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianaivo M, Kpodar K. (2012). Mobile phones, financial inclusion, and growth. *Review of Economics and Institution*. Vol.3 No.2
- Ang JB. (2010). Finance and inequality: the case of India. *Shouthern Economic Journal*. 76(3): 738-761
- Anwar, Arsyd M. dkk. (1992). *Ekonomi Indonesia prospek jangka pendek dan sumber pembiayaan pembangunan*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Beck, T. Demirguc-Kunt A, Levine R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*. 12:27-49.
- Beck, T. Demirguc-Kunt A, Peria MSM. (2006). Reaching out: access to and use of banking

- services across country. *Journal of Financial Economics*. 85:234-266.
- Badan Pusat Statistik. (2013). Tersedia pada <http://www.bps.go.id>
- Bank Indonesia. (2013). Statistik Perbankan Indonesia Tersedia pada <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indonesia/Default.aspx>
- Demirgüç-Kunt A, Beck T, Honohan P. (2008). *Finance for all? policies and pitfalls in Expanding Access*. Washington, DC (US): World Bank.
- Kasmir. (2004). *Dasar-dasar perbankan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada,
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Pengantar Ekonomi*, Edisi Kedua, Jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ototritas Jasa Keuangan. 2013. *Laporan Triwulanan OJK*. Tersedia pada: <http://www.ojk.go.id/>
- Sarma Mandira, Jesim Pais. (2011). Financial inclusion and development. *Journal of International Development*. 23:613-628.
- Shahbaz M., Islam F. (2011). Financial development and income inequality in Pakistan: An application of ARDL Approach. Munich Personal RePEc Archive (MPRA). 17:13.
- Sarma Mandira. (2012). Index of financial inclusion – A measure of financial sector inclusiveness. *Berlin Working papers on money, finance, trade and development*. Working paper No.07/2012.
- Suparmoko. (1997). *Ekonomi pembangunan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit UGM.
- Susilo, Sri Y, dkk. (2002). *Bank dan lembaga keuangan lain*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ummah. (2012). *Analisis keterkaitan inklusi keuangan dengan pembangunan di Asia*. Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Van der Werff AD, Hogarth JM, Peach ND. (2012). A Cross-country analysis of financial inclusion within the OECD. *Consumer Interest Annual*. Volume 59.
- Wachira MI, Kihui EN. (2012). Impact of financial literacy on access to financial services in Kenya. *International Journal of Business and Social Science*. Vol 3 No.19.
- European Commission Report. (2008). *Financial services provision and prevention of financial exclusion*. World Bank: Working Paper No 6025.